

PROGRAM PEMBERDAYAAN ANAK-ANAK TERLANTAR DI NUSA TENGGARA BARAT

Chairun Nasirin
Sekolah Tinggi Kesehatan Mataram
E-mail: chairun_nasirin@yahoo.com

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan hasil program pemberdayaan anak-anak terlantar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian ini memperlihatkan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, Pemerintah Provinsi NTB telah menjalankan Program Pemberdayaan Anak Terlantar melalui berbagai bentuk kegiatan seperti Pendidikan dan pelatihan bagi anak terlantar melalui BLK/KLK/LBK, bantuan usaha ekonomi produktif, bantuan bagi organisasi sosial, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat, melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi anak-anak terlantar, dan melakukan pendampingan sosial bagi anak-anak terlantar, serta melaksanakan sosialisasi dan diseminasi tentang perlindungan anak. Namun, apa yang telah dilakukan oleh Pemprov NTB masih jauh dari esensi pemberdayaan seperti menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), dan memberdayakan mengandung pula arti melindungi. *Kedua*, Pelaksanaan program pemberdayaan anak terlantar di NTB dinilai memberikan hasil dan manfaat bagi komunitas anak-anak terlantar. Namun, hasil dan manfaat tersebut belum dirasakan secara merata oleh keseluruhan anak terlantar di NTB dan belum jelas sejauhmana keberlanjutan program tersebut.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Anak Terlantar, Otonomi Daerah

A STUDY OF NEGLECTED CHILDREN EMPOWERMENT IN WEST NUSA TENGGARA

Abstract *This study aims to describe the implementation and results of development programs and neglected children in the province of West Nusa Tenggara. Results of this study show some of the following: First, the NTB provincial government has mejalankan Neglected Children Empowerment Program through various forms of activities such as education and training for displaced children through BLK / KKK / LBK, productive economic aid, assistance for social organizations, foundations and non-governmental organizations, entrepreneurial training activities for abandoned children, and social guidance for abandoned children, as well as socialize and dissemination of child protection. However, what has been done by the NTB provincial government is still far from the essence of empowerment that allows potential climate seperti menciptakan evolving society (enabling), or the potential to strengthen community-owned power (empowering), and it contains also means protecting empowering. Second, implementation of empowerment programs waif in NTB considered to provide results and benefits to the community of abandoned children. Yet. The results and benefits have not been felt equally by the whole waif in NTB and sustainability is unclear how far the program.*

Keyword: *Community Empowerment, Neglected Children, Local Autonomy*

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan proses pemerintahan dan pembangunan, pemerintah mempunyai kedudukan dan peran sangat strategis berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Melalui Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (PEMDA), yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, daerah diberikan kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, termasuk dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah sosial seperti anak-anak terlantar.

Sementara itu, Peraturan PP No. 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang menuntut perhatian persyaratan-persyaratan kapabilitas untuk menangani berbagai hal, yang berkaitan dengan: (a) implikasi pengetrapan kaidah-kaidah demokrasi, penyertaan peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan dan perhatian terhadap potensi daerah dalam era reformasi; (b) persaingan global dan pengelolaan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab; (c) konstelasi sistem pemerintahan yang berimplikasi terhadap adanya pola hubungan kemitraan antara legislatif eksekutif dalam suatu jejaring kerja antar lembaga (*inter agency network*); (d) pengurusan prakarsa dan energi otonom serta distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan perekonomian daerah, (e) meningkatnya sumber daya keuangan dan pembiayaan yang berimplikasi terhadap upaya peningkatan demokrasi sofistikasi perencanaan dan kinerja unggulan penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang terbuka secara normatif yang dapat menginterpretasikan kaidah-kaidah pemerintahan yang baik sesuai yang telah digariskan.

Setiap program pembangunan masyarakat pada dasarnya selalu menempatkan pentingnya institusi pemerintah daerah instrumen pembangunan, khususnya di era otonomi daerah. Rondinelli (1983) menjelaskan bahwa desentralisasi adalah merupakan manifestasi perencanaan, pengambilan keputusan atau merupakan suatu kewenangan administratif dari pemerintah kepada organisasinya. Oleh karena itu, setiap rencana pembangunan pada masa lalu selalu diorientasikan pada tugas umum pemerintahan (*regular function*)

serta fungsi pembangunan (*development function*) dalam rangka pembenahan birokrasi publik kearah yang lebih baik. Disisi lain, walaupun Indonesia menganut prinsip negara kesatuan dimana pusat kekuasaan berada pada pemerintah pusat, namun dengan menyadari keberagaman yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, baik kondisi sosial, ekonomi maupun budaya, dan dengan diberlakukannya kebijakan ini tentunya hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial seperti halnya anak terlantar (*neglected*) tentunya dapat berjalan baik. Dengan demikian, pelimpahan sebagian kewenangan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, seperti halnya dinas sosial, departemen tersebut tentunya dapat melaksanakan tugas rutin, serta dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik di daerahnya.

Kehidupanmasyarakat yang sejahtera merupakan kondisi ideal dan menjadi dambaan setiap warga masyarakat (Soetomo, 2008), karena itu merupakan kewajiban negara (*stateobligation*) untuk memberikan jaminan pada setiap warga untuk memperoleh akses yang baik terhadap berbagai kebutuhan dasar manusia (Raper, 2008). Masalah sosial yang terkait dengan keterlantaran anak merupakan fenomenasosial yang tidak dapat dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama bagimasyarakat yang tinggal di perkotaan, dimana salah satu faktor dominan yang akan mempengaruhi perkembangan masalah sosial tersebut adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu dampak negatif terhadap meningkatnya arus urbanisasi dari daerah pedesaan menuju kota.

Salah satu fenomena masalah sosial yang dihadapi Provinsi NTB, seperti di Kota Mataram, adalah banyak ditemukan anak-anak yang menghabiskan waktunya di jalanan. Bahkan, hasil penelitian tahun 2011 dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial menunjukkan di Propinsi NTB terdapat 12 ribu anak jalanan dari total 94 ribu anak jalanan. Jumlah itu

terbanyak se-Indonesia sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah Anak Jalan di 10 Provinsi di Indonesia

No.	Provinsi	Jumlah
1.	Nusa Tenggara Barat	12.764
2.	Nusa Tenggara Timur	11.937
3.	Jawa Tengah	8.027
4.	Jawa Timur	7.872
5.	Jawa Barat	4.650
6.	Sulawesi Tengah	4.636
7.	Banten	3.902
8.	Sumatera Barat	3.353
9.	Maluku	2.899
10.	Lampung	2.799

Sumber: Pusdatin Kemensos, 2010.

Aktivitas anak-anak terlantar dijalanan ini lebih banyak melakukan kegiatan meminta-minta dengan cara menadahkan tangan ke tiap orang yang lewat. Lebih parah lagi tidak sedikit yang mangkal di tempat-tempat yang berbahaya atau mengganggu ketertiban umum seperti *traffic light*, trotoar, dan sebagainya. Umumnya, ada beberapa penyebab menjamurnya anak-anak terlantar di NTB, yaitu permasalahan ekonomi dan minimnya kepedulian masyarakat di berbagai daerah di NTB, karena umumnya anak terlantar di Kota Mataram merupakan pendatang dari Kabupaten se-NTB. Mereka adalah anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi yang sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga miskin dan tidak mempunyai kemampuan untuk memberdayakan dirinya. Selama ini, program-program untuk mengatasi anak-anak terlantar di jalanan di NTB, hususnya Kota Mataram, telah dilakukan melalui program-program dibidang kesejahteraan sosial

Program-program tersebut di antaranya seperti:

1. Menyatukan persepsi, koordinasi dan memfasilitasi terbitnya Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Penangan Masalah Strategis;
2. Penyaluran bantuan bagi 150 Kelompok Usaha Bersama (KUBE), 15 Yayasan,

- 34 Asuhan Keluarga serta pemberian bantuan pada 13 organisasi Profesi/Lembaga/LSM/Organisasi Sosial lainnya;
3. Pemberian bantuan bagi anak yatim piatu tahun 2010 sebanyak 2050 orang senilai Rp. 200.000,-/orang; dan
4. Penyaluran bantuan kepada 70 Lembaga/Yayasan/Pantai Asuhan/Kelompok/Organisasi Lainnya pada tahun 2009 yang tersebar di 9 Kabupaten/ Kota se-NTB.(Sumber: RPJMD NTB 2009-2013).

Kemudia, program-program penanganan anak terlantar juga dapat dilihat dibeberapa satuan kerja di lingkungan Pemprov NTB. *Pertama*, Dinas Pendidikan Provinsi NTB. Dinas Pendidikan memandang keberadaan anak jalanan sebagaianak putus sekolah. Untuk itu kebijakan penanganan yang diterapkanadalah penempatan anak jalanan pada lembaga-lembaga ketrampilanbagi anak putus sekolah. Selain itu Dinas ini juga memberikancesempatan kepada anak jalanan untuk mengikuti Paket Belajar A, Bmaupun C serta ujian-ujian persamaan. Disamping itu, Dinas ini jugamengalokasikan dana yang cukup besar yang tersebar di sejumlahwilayah untuk penyelenggaraan PKBM (Pusat Kegiatan BelajarMasyarakat). *Kedua*, Dinas Sosial Provinsi NTB. Dinas Sosial Kota Mataram tidak secara khusus menetapkan kebijakan penanganan anak jalanan. Anak jalanan dipandang sebagai bagian anak terlantar pada umumnya, yang dengan demikian penangannya juga dimasukkan dalam kategori anak terlantar. Anak terlantar ditangani melalui basis keluarga (*family base*), basis masyarakat (*community base*), dan basis institusi (*institutional base*). (Sumber: Hasil Penelitian Pusdatin Kemensos, 2011).

Mencermati berbagai program dan kegiatan penanganan anak-anak terlantar di Provinsi NTB, maka pertanyaan penelitian yang menarik diajukan adalah sebagai berikut:

bagaimanakah pelaksanaan dan hasil program penanganan anak terlantar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah NTB dalam rangka meningkatkan kemandirian kesejahteraan sosial bagi anak terlantar?

Peran Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang penting bagi proses kehidupan masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun membutuhkan pelayanan pemerintah (Sarundajang, 2002). Dan secara sadar atau tidak sadar, harus diakui bahwa banyak sisi kehidupan kita sehari-hari yang erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya.

Penyelenggaraan program jaminan sosial harus melibatkan pemerintah daerah dan keterlibatan pemerintah daerah diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan program jaminan sosial bagi penduduk di daerah agar lebih baik. Menurut Sulastomo (2008), ada beberapa peran pemerintah dalam meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat, yaitu: (1) pengawasan penyelenggaraan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), agar sesuai dengan ketentuan, (2) menyediakan anggaran tambahan untuk iuran, baik untuk “penerima bantuan iuran” ataupun masyarakat yang lain; (3) penentuan peserta “penerima bantuan iuran”; (3) penyediaan/pengadaan dan pengelolaan sarana penunjang, misalnya sarana kesehatan; mengusulkan pemanfaatan/investasi dana Sistem Jaminan Sosial Nasional di daerah terkait; dan saran/usul kebijakan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Dalam hal mengurus rumah tangganya pemerintahan, Sarundajang (2002) lebih jauh menjelaskan beberapa ciri-ciri pada pemerintahan lokal (*local self government*), yaitu: (1) segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan urusan-urusan rumah tangga sendiri, oleh sebab itu urusan-urusannya perlu ditegaskan

secara terperinci; (2) penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan yang seluruhnya bukan terdiri dari pada pejabat pusat, tetapi pegawai pemerintah daerah; (3) penanganan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijaksanaan sendiri; (4) hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan saja; (5) seluruh penyelenggaraan pada dasarnya dibiayai dari sumber keuangan sendiri.

Karena itu, pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan invasi masyarakat lainnya dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakan administrasi keadilan secara pasti (Muluk, 2007). Disisi lain sudah menjadi idaman bagi masyarakat negara-negara di dunia untuk memperoleh tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mampu mengelola pemerintahan secara baik pula.

Selama ini masyarakat sering memandang sinis terhadap pemerintahannya sendiri, karena berbagi perilaku yang kurang simpatik dan lebih cenderung bersikap sebagai penguasa daripada pelayanan masyarakat. Karenanya, salah satu tuntutan di era reformasi saat ini adalah menciptakan pemerintahan yang baik, dimana Pemerintah daerah harus mampu melayani masyarakat secara baik, menciptakan iklim yang memungkinkan kreatifitas masyarakat berkembang dan yang mampu mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat secara arif bijaksana, sehingga masyarakat makin merasa membutuhkan keberadaan pemerintah tersebut.

Senada dengan pernyataan diatas, Kessler, dkk (2005) menyarankan perlunya *best practice* bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan, seperti perlunya suatu negara untuk menyiapkan konsultan ahli yang khusus menangani masalah sosial yang berkaitan dengan keterlantaran dengan melakukan

pendekatan sistem bagi anak yang mempunyai masalah sosial.

Sejalan dengan hal itu, Stewart and Stewart (1994) menjelaskan empat macam peran penting pemerintah, yaitu: (a) *alokatif*, yaitu peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. (b) *distributif*, yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. (c) *stabilisatif*, yaitu peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan *disequilibrium*. (d) *dinamisatif*, yaitu peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang, dan maju.

Pemerintah daerah mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tidak terkecuali dalam meningkatkan kesejahteraan bagi anak terlantar, serta pemenuhan kebutuhan dalam menyediakan kebutuhan bagi penduduknya. Ada beberapa alasan pemerintah melakukan penyediaan barang publik yang sesuai dengan kebutuhan penduduknya. Stewart and Stewart (1994) menjelaskan empat hal pokok tersebut sebagai berikut. *Pertama*, dalam sistem pemerintahan yang bertingkat, birokrat pada tingkat bawah memiliki pengetahuan yang lebih (*knowledge in society*) tentang keinginan penduduknya, jika dibandingkan dengan sistem sentralisasi. *Kedua*, dengan adanya desentralisasi, pemerintah tentunya akan menjamin kontrol yang lebih demokratis terhadap aparat. *Ketiga*, pemerintah dari berbagai tingkatan harus saling bekerja sama dan jika salah satunya mengabaikan keinginan warganya, mereka dapat melakukan tekanan pada pemerintah. *Keempat*. Penyediaan oleh daerah menghasilkan barang dan jasa publik lokal yang lebih efisien dan penduduk menjadi lebih sadar akan biaya pelayanan. dengan demikian peran pemerintah daerah dapat menjadi senjata yang efektif untuk

menyalurkan tekanan lokal serta dapat menyatukan kepentingan daerah.

Pemberdayaan Anak-Anak Terlantar

Pemberdayaan merupakan suatu strategi pembangunan yang diarahkan langsung pada akar persoalannya yaitu dengan meningkatkan kemampuan berbagai kelembagaan sosial lokal yang diduga dapat menjadi faktor penguat dalam menunjang keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah (Friedmann, 1992).

Anak-anak adalah bagian kelompok anggota masyarakat yang kurang beruntung karena berbagai faktor yang dialami keluarganya, seperti persoalan kemiskinan. Menurut Direktorat Pelayanan Sosial Anak Depsos RI (2005), definisi anak-anak terlantar di jalanan atau disebut dengan *children of the street* adalah anak yang memanfaatkan hampir seluruh waktunya untuk tinggal di jalanan. Anak-anak terlantar mengalami kerenggangan bahkan keterputusan hubungan dengan orang tua mereka sehingga akhirnya mereka hidup berbagai tempat yang rentan menjadi korban korban pelecehan sosial, emosional, fisik dan bahkan seksual.

Pemberdayaan anak-anak terlantar menurut Mujiyadi, dkk (2011) dapat dilakukan dengan tiga model. *Pertama*, *family based*. Model ini berbasiskan pemberdayaan kelembagaan keluarga melalui melalui pemberian modal usaha, memberikan tambahan makanan, dan memberikan penyuluhan tentang keberfungsian keluarga dan lain sebagainya. Hasil yang diharapkan dari model ini adalah upaya aktif keluarga dalam membina dan menumbuh kembangkan anak terlantar di jalanan. *Kedua*, *institutional based*. Inti dari model pemberdayaan ini adalah memberdayakan lembaga-lembaga sosial di masyarakat dengan menciptakan *networking*, kolaborasi, dan kemitraan. Pola kemitraan, jejaring, dan kolaborasi melibatkan berbagai lembaga sosial kemasyarakatan dengan institusi pemerintahan maupun pemerintah seperti kalangan dunia usaha. *Ketiga*, *multi-system based*. Model ini merupakan model

yang komprehensif, terintegrasi, dan sistematis dengan membangun jaringanyang mengakomodasi berbabagi pihak yang terkait dengan pemberdayaan anak-anak terlantar, yaitu anak terlantar di jalanan, keluarga anak terlantar, masyarakat, pemerhati anak, kalangan akademisi, aparat pemerintah serta instansi terkait lainnya.

Esensi pemberdayaan anak-anak terlantar sejalan dengan substansi konsep pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan Friedman (1992), dimana pemberdayaan anak terlantar memberikan perhatian pada dua hal, yaitu: (1) pengaturan oleh diri masyarakat atau komunitas anak terlantar (*self-organizing*) dan (2) membangun kepercayaan diri anak-anak terlantar (*self reliance*). Pemberdayaan kelompok sosial anak-anak terlantar ini merupakan alternatif pembangunan yang memberi titik tekan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang diberdayakan dengan berlandaskan pada sumber daya pribadi, partisipatif, demokratis dan pembentukan kelembagaan sosial melalui pembelajaran sosial berdasarkan pengalaman.

Program pemberdayaan anak-anak terlantar dalam relevan dengan konsep pemberdayaan yang digunakan oleh Narayan (2002), yaitu "*Empowerment refers broadly to the expansion of freedom of choice and action to shape one's life*". Baginya, pemberdayaan merupakan pengembangan dari kebebasan untuk memilih dan berbuat dalam rangka menentukan masa depan kehidupannya.

Ada empat elemen kunci keberhasilan dari suatu program pemberdayaan yang dikemukakan Narayan (2002: 18-22) dan ini dapat digunakan untuk menjelaskan dalam konteks pemberdayaan anak terlantar. *Pertama*, elemen *access to information*. Artinya perlu ada informasi yang sifatnya timbal balik antara *government to citizens* dan *from citizens to government*. *Kedua*, elemen *inclusion and participation*. Kelompok miskin harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan diberikan kewenangan serta pengendalian terhadap

pengelolaan sumber daya yang tersedia. *Ketiga*, elemen *accountability*. Para pelaksana program pemberdayaan, seperti pemerintah, bisnis, dan politisi, harus menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu "*making them answerable for their policies and actions that affect the wellbeing of citizens*". *Keempat*, elemen *local organizational capacity*. Substansi dari elemen ini mengacu pada "*the ability of people to work together, organize themselves, and mobilize resources to solve problems of common interest*".

Pemberdayaan anak terlantar dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan (*sustainable human development*). Pemberdayaan tersebut merupakan mekanisme alokasi manfaat sosial (*social benefits*), dan memberikan suara kelompok miskin dan keterlantaran dalam pembentukan keputusan politik dan pemerintah (*political and government decision making*) untuk melindungi dan memperkuat budaya, keyakinan agama dan nilai-nilai. Hal ini disetujui oleh Clark (1998) dalam salah satu *chapter* yang berkaitan dengan "*Minorities and Discrimination*", menjelaskan bahwa pada umumnya para ahli sosial politik tidak setuju dengan definisi yang terkait dengan adanya diskriminasi. Hal ini dijelaskan juga bahwa diskriminasi tersebut tentunya akan berdampak pula pada budaya dan lembaga-lembaga yang terkait dengan masalah tenaga kerja, latar belakang keluarga, kualitas pendidikan, lingkungan sekitar, perilaku sosial di dalam masyarakat.

Pokok-pokok pikiran diatas menggambarkan mengenai pentingnya kehidupan yang setara bagi warga masyarakat, sehingga pemenuhan hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, lapangan kerja maupun jaminan sosial dapat menjadi prioritas negara dalam menghilangkan diskriminasi. Seperti halnya konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah diharapkan dapat menjamin distribusi kebutuhan dasar warganya untuk dapat mencapai standar kehidupan yang memadai. Kusumaatmadja (2007)

berpandangan bahwa dalam praktiknya dalam negara kesejahteraan, suatu pemerintahan tentunya harus dapat: (a) mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik; (b) menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata; (c) mengurangi kemiskinan, (d) menyediakan asuransi sosial (pendidikan, kesehatan) bagi masyarakat miskin; (e) menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantaged people*; (f) memberi proteksi sosial bagi tiap warganya.

Pada dasarnya, permasalahan yang paling mendasar dari kehidupan di negara-negara berkembang ialah kemiskinan sekalipun mereka mempunyai sumber-sumber kekayaan alam (*raw material*). Ikbar (2006) menjelaskan bahwa kemauan yang kuat bagi negara-negara berkembang untuk melepaskan diri dari kemiskinan baik karena produk sejarah penjajahan yang panjang, atau karena pemerintah yang salah urus maupun akibat menjadi objek-objek negara besar dan industri. Karena itu, studi kapitalis-liberalisme secara umum banyak pula mempersoalkan keterbelakangan dunia ketiga karena faktor-faktor domestik dan kekeliruan kebijakan negara-negara yang beriklim tidak kondusif, situasi represif, dan pemerintah yang tidak bersih maupun pelecehan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, *the study of welfare reform has become an inquiry into administrative implementation of policies*. (Ewalt&Jennings Jr,2004), sehingga pemikiran yang berkaitan dengan negara sejahtera tentunya merupakan bentuk implementasi dari administrasi kebijakan publik dalam arti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya komunitas anak-anak terlantar.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang ditujukan untuk menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantitatif (pengukuran) (Strauss

dan Corbin, 2003). Penelitian ini dilakukan terhadap setting masalah dikaji dan dilakukan secara komprehensif, *holistic*, mendalam dan sesuai dengan kondisi latarnya (alamiah).

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan dan hasil program penanganan anak terlantar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB dalam rangka meningkatkan kemandirian kesejahteraan sosial bagi anak terlantar.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi NTB, khususnya di kawasan-kawasan strategis perkotaan tempat dimana-mana anak-anak terlantar menjalankan aktivitasnya.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui : *pertama*, metode wawancara mendalam untuk mengeksplorasi informasi tentang fenomena pemberdayaan anak terlantar yang merupakan fokus penelitian ini. Sebagai informan adalah pihak yang menguasai persoalan pemberdayaan anak terlantar seperti Dinas Sosial Pemprov. NTB, anak-anak terlantar sebagai objek program pemberdayaan, dan lembaga-lembaga *civil society* yang bergerak di perlindungan anak. *Kedua*, teknik observasi dengan mengamati langsung objek penelitian, seperti aktivitas harian anak terlantar dan pelaksanaan program pemberdayaan anak terlantar. Sedangkan data sekunder meliputi data-data seperti BPS NTB dalam Angka, RPJMD Provinsi NTB, dan dokumen terkait lainnya.

Teknik Analisis Data

Seluruh data hasil penelitian dianalisis dengan analisis kualitatif lalu disajikan secara deskriptif yang berisi kutipan-kutipan hasil observasi maupun hasil wawancara mendalam. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, yang diakhiri dengan verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis

Letak dan Keadaan Alam Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki luas wilayah 20.153,15 km². Terletak antara 115° 46' - 119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9° 5' Lintang Selatan. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 148 m dari permukaan laut sementara Raba terendah dengan 13 m dari permukaan laut. Dari tujuh gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan tertinggi dengan ketinggian 3.775 m, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 m.

Berdasarkan data statistik dari lembaga meteorologi, temperatur maksimum pada tahun 2001 berkisar antara 30,9° - 32,1° C, dan temperatur minimum berkisar antara 20,6° - 24,5° C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan September dan terendah ada bulan Nopember. Sebagai daerah tropis, NTB mempunyai rata-rata kelembaban yang relatif tinggi, yaitu antara 48 - 95 %.

Secara geografis, Provinsi Nusa Tenggara Barat Terletak Antara Barat - Timur 115° e46' Bujur Timur Utara - Selatan 8° 10' Lintang Selatan. Sedangkan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Selanjutnya sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok / Prop. Bali dan terakhir sebelah timur dengan Selat Sape / Propinsi NTT. (Sumber: NTB dalam Angka Tahun 2012).

b. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Provinsi NTB terdiri dari 2 pulau utama yaitu Pulau Lombok yang berada dalam kawasan seluas 4,738.70 kilometer persegi dengan panjang pulau dari barat ke timur sejauh 80 Km. Sedangkan Pulau Sumbawa tiga kali lebih luas, yakni 15,414.45 Km², sepanjang 300 Km dari barat ke timur dan 100 Km dari utara ke selatan. Dengan dua pulau besar itu, luas wilayah NTB adalah 20,153,15 Km².

Namun keadaan geografi tersebut berbanding terbalik dengan kondisi demografi NTB. Pada kenyataannya jumlah penduduk di Pulau Lombok lebih besar dari jumlah Penduduk Pulau Sumbawa dengan perbandingan 3 : 1.

Tingkat pertumbuhan penduduk kurang lebih 1,42 persen per tahun dari 4, 5 juta jiwa lebih penduduk NTB. Matapencaharian penduduk NTB sebagian besar pada sektor pertanian dalam arti luas, kemudiansektor perdagangan dan jasa serta industri rumah tangga. Dengan lebih dari empat juta penduduk NTB tersebut dinamika kehidupan sosial masyarakat di provinsi ini amat dinamis. Warga NTB yang ramah dan terbuka, hidup berdampingan secara harmonis.

Kendati masyarakat NTB terdiri dari tiga suku bangsa utama, mereka hidup dalam kerukunan dan keselarasan jalinan sosial kemasyarakatan. Dua dari tiga suku bangsa di NTB, adalah penduduk asli Pulau Sumbawa. Mereka disebut Tau Samawa atau orang Sumbawa, dan suku lainnya adalah Mbojo, yaitu masyarakat asli di Bima dan Dompu. Sedangkan penduduk asli Pulau Lombok adalah orang sasak. Meskipun hidup dalam adat dan kebiasaan berlainan, masyarakat NTB memiliki rasa persaudaraan dan solidaritas yang turun-temurun dan terpelihara. Bahkan NTB sejak lama juga ditinggali oleh lebih dari satu suku bangsa pendatang. Suku bangsa bali dan bugis yang telah bermigrasi ke NTB lebih dari dua abad silam. Tetapi keseimbangan pergaulan sosial masyarakat amat terasa dalam pergaulan sehari-hari di semua pemukiman penduduk dan di setiap jengkal tanah NTB. Meski warga NTB dihuni penganut agama berbeda-beda, namun warga hidup berdampingan penuh kerukunan dan toleransi. Lihatlah, bangunan rumah ibadah berdiri dengan megah. Ribuan masjid di Pulau Lombok dan Sumbawa, ratusan rumah ibadah umat hindu, puluhan gereja, dan beberapa sarana ibadah umat lainnya, dibangun dengan jarak sepeinggalah. Suasana itu mencipta kedamaian jiwa dan kesetiakawanan yang tak lekang oleh zaman.

Secara sektoral, ekonomi NTB tahun 2009 dibanding tahun 2008 mengalami perkembangan pada sektor pertambangan, industri, listrik dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel & restoran, lembaga keuangan, dan sektor jasa, sedangkan sektor pertanian dan pengangkutan tumbuh cukup. Laju pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2009 sebesar 9,07% (tanpa pertambangan non migas) atau sebesar 14,89% (termasuk pertambangan non migas). Dibandingkan tahun 2008 sebesar 6,69% (tanpa pertambangan non migas) atau 2,07% (dengan pertambangan non migas) berarti mengalami laju pertumbuhan cukup signifikan. BPS Provinsi NTB mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB pada semester I tahun 2010 mencapai 13,99%, berada di urutan kedua secara nasional setelah provinsi Sulawesi Barat.

PDRB Provinsi NTB, pada triwulan II-2010 yang dihitung atas dasar harga (ADH) berlaku mencapai Rp. 12,11 triliun, sedangkan penghitungan ADH konstan mencapai Rp. 4,85 triliun.

Jumlah penduduk miskin di NTB terus mengalami penurunan. Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk miskin tahun 2010 sebanyak 1.009.352 orang atau 21,55% mengalami penurunan pada bulan Maret 2011 sebanyak 114.582 orang atau 1,82% sehingga total penduduk miskin sampai dengan bulan Maret 2011 sebanyak 894.770 orang atau 19,73%. (Sumber: RPJMD NTB Tahun 2009-2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Anak Terlantar

Persoalan anak-anak terlantar di NTB berakar dari persoalan kemiskinan, sehingga penanganannya harus menyentuh pada akar persoalan tersebut. Berkaitan dengan hal itu pemerintah Provinsi NTB menyusun program yang diperuntukkan bagi kegiatan penanganan dan pemberdayaan anak terlantar. Program tersebut adalah Program Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar dengan kegiatan-kegiatan penunjangnya seperti:

1. Pendidikan dan pelatihan bagi anak terlantar melalui BLK/KLK/LBK. Kegiatan ini merupakan pemberian pembekalan ketrampilan bagi anak-anak terlantar yang sesuai dengan minatnya, sehingga akan mudah mengarahkan pada proses pemagangan di unit atau lembaga usaha tertentu yang ada di tengah masyarakat. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan motivasi dan kepercayaan diri pada anak-anak terlantar dalam rangka keberhasilan mereka pada saat pengelolaan dan pemanfaatan bantuan yang akan diberikan pasca kegiatan pendidikan dan latihan kerja.
2. Bantuan usaha ekonomi produktif. Ini merupakan kegiatan pemberian bantuan modal dana kepada komunitas anak-anak terlantar secara langsung maupun melalui panti-panti sosial yang menangani anak-anak terlantar. Manfaat yang diharapkan adalah pengelolaan yang baik terhadap modal usaha diharapkan mampu mengembangkan usaha lebih lanjut dan mampu menunjang kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak terlantar.
3. Bantuan bagi organisasi sosial, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan organisasi-organisasi sosial tersebut dalam menangani anak-anak terlantar.
4. Melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi anak-anak terlantar.
5. Melakukan pendampingan sosial bagi anak-anak terlantar.
6. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi tentang perlindungan anak. (Sumber: Hasil olah data tahun 2009).

Berdasarkan hasil analisis data primer dan sekunder, penelitian ini mengungkapkan beberapa hasil temuan lapangan terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan anak terlantar selama ini di Provinsi NTB. *Pertama*, pemberdayaan anak terlantar dilakukan dengan memberikan pelayanan pendampingan di kawasan-kawasan tempat beroperasinya

anak-anak terlantar, seperti di jalan-jalan, kawasan wisata, maupun kawasan pasar-pasar tradisional. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berbentuk penyediaan konsumsi, pakaian, dan makanan yang sehat dan bersih, memberikan penyuluhan dan nasehat dan pemberian ketrampilan hidup (*life skill*). *Kedua*, pemberdayaan terhadap komunitas anak terlantar dilakukan menciptakan usaha mandiri bagi anak terlantar. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha, pendidikan dan latihan kewirausahaan, dan pendampingan untuk pengembangan usaha tersebut. *Ketiga*, pembinaan dan pendampingan anak-anak terlantar di lokasi-lokasi penempatan, seperti panti asuhan, rumah singgah dan sanggar kegiatan belajar. Suatu kebijakan publik yang berhasil tidak semata-mata diukur dari keberhasilan pelaksanaannya, tapi sejauhmana pelaksanaan tersebut memberikan hasil dan manfaat kepada objek target dari sasaran kebijakan.

Melihat secara kritis perjalanan program pemberdayaan anak di Provinsi NTB ada beberapa evaluasi yang dapat disampaikan. *Pertama*, belum mampu berimplikasi pada pengurangan anak terlantar secara signifikan, seperti yang terjadi di Kota Mataram dimana baru 9.115 anak yang sudah ditangani dan ini sangat jauh bila dibandingkan dengan total jumlah anak terlantar di Kota Mataram, yaitu sebanyak 24.058 anak. *Kedua*, dari segi lamanya waktu pelaksanaan tidak sebanding dengan hasil yang diraih. Hal terjadi juga di Kota Mataram, yaitu selama tujuh tahun (2002 – 2008) Pemerintah Kota Mataram hanya mampu mengatasi 9.115 anak terlantar dari 24.058 anak terlantar di Kota Mataram. *Ketiga*, alokasi anggaran pemberdayaan anak terlantar yang sangat terbatas, dan itu pun dari total kegiatan yang tidak secara langsung diarahkan pada pemberdayaan anak. *Keempat*, penyebab lemahnya kinerja dari program pemberdayaan anak terlantar di NTB adalah belum menjadi skala prioritas pembangunan dan tidak adanya “payung hukum” dari program pemberdayaan anak terlantar dalam bentuk perda.

Apa yang telah dilakukan oleh Pemprov NTB masih jauh dari esensi pemberdayaan sebagaimana dijelaskan oleh Kartasmita (1996) berikut ini. *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah bahwa masyarakat atau komunitas anak-anak terlantar, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang samasekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan variatif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat komunitas anak terlantar menjadi makin berdaya. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program selama cenderung umum dan monoton yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan anak terlantar, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena ketidakberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Program pemberdayaan anak terlantar di Provinsi NTB dapat dianalisis dengan pandangan Prasodjo (2007).

Pertama, diskontinuitas dan diskoordinasi. Selama ini pelaksanaan program pemberdayaan anak terlantar di NTB pelaksanaannya lemah secara koordinasi, bersifat rutinitas dan tidak jelas desain keberlanjutannya. Keberlanjutan yang pasti hanya sekedar justifikasi formalitas ketentuan urusan yang harus ditangani dan berimplikasi pada anggaran. Kebijakan pemerintah kadang malah berseberangan dengan pendampingan yang dilaksanakan oleh LSM. Orientasi program yang dilaksanakan oleh pemerintah NTB selama ini, pada satu sisi menampakkan hasil yang nyata dalam bentuk angka-angka, namun pada sisi yang lain terkadang tidak menyentuh akar permasalahan yang ada.

Kedua, disinformasi program, yaitu pemberdayaan masyarakat yang dijanjikan dengan bantuan para konsultan terkadang tidak difahami oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan oleh para ilmuwan atau konsultan tersebut terkadang tidak dapat difahami oleh masyarakat atau lembaga pelaksana dari pemberdayaan masyarakat tersebut. Demikian juga yang terjadi pada pelaksanaan program pemberdayaan anak terlantar di NTB, hal berkaitan dengan para birokrat daerah yang belum memiliki kompetensi spesifik pemberdayaan anak terlantar.

Ketiga, disorientasi, yaitu pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan proses biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Banyaknya masalah baru yang muncul, disertai pula oleh hasil yang belum tampak nyata terkadang menjadikan fasilitator, baik dari pemerintah atau LSM, mengubah kebijakan yang lebih nyata. Pergeseran pendekatan, dari proses ke hasil, ini bukanlah solusi. Langkah sinergis yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan menyelaraskan kedua pendekatan tersebut. Pelaksanaan pemberdayaan anak terlantar selama ini lebih berorientasi pada hasil, yaitu terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran secara optimal, namun tidak pernah berorientasi pada proses perubahan anak terlantar menuju kemandirian, kepercayaan

diri dan independensi. Pendekatan hasil bagi kalangan Pemda NTB dianggap lebih simpel dan praktis dibandingkan orientasi proses yang membutuhkan waktu lama dan ketekunan penanganan anak terlantar.

Keempat, Generalisasi, yaitu diferensiasi sosial, politik, dan budaya yang ada di Indonesia merupakan kekayaan yang tidak ternilai. Dengan kondisi yang majemuk tersebut, maka pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya pendekatan pembangunan yang tidak bersifat monolitik. Pendekatan pembangunan, dan juga pemberdayaan, yang lebih bersifat dinamis, dengan memperhatikan nilai-nilai dasar yang ada di masyarakat, karakter budaya, serta struktur sosial masyarakat sangatlah diperlukan saat ini. Lebih dari itu, pendekatan multidisiplin menjadi penting. Konsepsi ini belum nampak dalam penanganan anak terlantar di NTB, selama ini pemerintah daerah cenderung mengambil jalan pintas penyusunan program, yaitu meniru program dan kegiatan yang telah disusun oleh Kementerian Sosial Pemerintah Pusat.

Kelima, indikator yang tidak tepat, pemberdayaan masyarakat selama ini selalu diukur dalam bentuk fisik, komoditas dengan berorientasi pada input dan kualitatif daripada non-fisik dengan ukuran keberhasilan dari dampak dan proses. Indikator program pemberdayaan anak terlantar di NTB selama ini hanya didasarkan nilai-nilai yang sifatnya material, seperti penyerapan anggaran dan jumlah kuantitas anak terlantar yang tertangani, dengan mengesampingkan nilai non materi dalam pemberdayaan masyarakat. Kesadaran akan nilai, hukum, ataupun partisipasi politik masyarakat yang terkadang tidak dapat diukur menjadi terabaikan. Bahkan lebih parah lagi, program pemberdayaan anak terlantar selama ini tidak memiliki indikator baku keberhasilan program.

b. Hasil Program Pemberdayaan Anak Terlantar

Pelaksanaan program pemberdayaan anak terlantar di NTB dapat dinilai dari hasil dan manfaat yang diterima bagi komunitas anak-anak terlantar. Secara garis besar program pemberdayaan anak terlantar di NTB ini memberikan hasil dan manfaat yang nyata, akan tetapi sejauhmana hal itu diterima dan dirasakan oleh keseluruhan anak terlantar di NTB. Sebagai contoh, dapat dikemukakan kemajuan program di Kota Mataram, laporan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkot Mataram tahun 2008 memperlihatkan hasil yang positif, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. Pelaksanaan, Anggaran, dan Hasil Program Pemberdayaan Anak Terlantar

No.	Fokus	Temuan
1	Pelaksanaan Kegiatan	Telah dilaksanakan kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan bagi anak terlantar, seperti pelatihan kewirausahaan bagi anak terlantar yang menerima bantuan UEP dan KUBe, bimbingan sosial bagi anak-anak PMKS dan peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.
2	Anggaran	<p>1. Terealisasi Rp. 21.827.000,- untuk pelaksanaan bimbingan anak terlantar atau 95,17% dari total anggaran Rp. 22.934.000.</p> <p>2. Terealisasi Rp. 18.152.500,- untuk pelaksanaan bimbingan sosial di panti asuhan atau 94,92% dari total Rp. 18.152.500,-</p> <p>3. Terealisasi Rp. 68.140.000,- untuk pelaksanaan peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat atau 98,69% dari total Rp. 68.140.000,-.</p>
3	Hasil dan Manfaat	Aktivitas anak terlantar lebih terkontrol dan terawasi serta positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, meningkatnya motivasi anak terlantar dalam pengelolaan bantuan UEP kepada KUBe Anak Terlantar, keluarga anak terlantar menjadi produktif dan bisa belajar mengelola sebuah usaha keluarga dalam rangka mempersiapkan kemandirian anak, hasil pengelolaan modal usaha dapat dimanfaatkan untuk menunjang biaya sekolah dan kebutuhan anak sehari-hari, hasil usaha KUBe menjadi lebih besar dan dapat dibagi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dan dapat hidup lebih mandiri dan meningkatkan kesejahteraan sosial anak terlantar.

Sumber:Hasil olah data tahun 2009.

Implikasi lain dari pelaksanaan program pemberdayaan anak terlantar yang dijumpai di Provinsi NTB juga berdampak pada pelaku-pelaku non pemerintah, seperti yayasan panti asuhan, organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati kesejahteraan anak. Melalui program pemberdayaan anak terlantar turut memberikan kontribusi kepada lembaga-lembaga tersebut berupa: (1) Mendorong partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaga sosial dalam upaya perlindungan dan membangun kemandirian anak secara wajar. (2) Menjadikan eksistensi lembaga-lembaga sosial menjadi penting bagi peningkatan kesejahteraan sosial anak terlantar. (3) Petugas pendamping sosial menjadi lebih fokus dan meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya dalam pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar. (4) Masyarakat dan instansi terkait mendapatkan informasi yang jelas tentang permasalahan dan pelayanan kesejahteraan sosial anak yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak.

Mencermati hasil dan manfaat program pemberdayaan anak terlantar di NTB, dapat dianalisis dengan pandangan Chambers, Friedmann dan Narayan juga. Menurut perspektif mereka, pemerintah daerah NTB sesungguhnya belum melakukan pemetaan investasi terhadap anak-anakterlantar. Padahal dalam melakukan program pemberdayaan anakterlantar dibutuhkan kejelasan aset dan kapasitas. Menurut Chambers (1987), Friedmann (1992) dan Narayan (2000), ases dankapabilitas suatu komunitas yang akan diberdayakan meliputi duakomponen, yaitu komponen individu yang terdiri dari *material, human, social*, dan *political*. Komponen kedua adalah kolektivitas yang terdiridari *voice, organization* dan *representation*. Pemerintah NTB hanya mampu memetakan kondisi anak-anak terlantarsecara faktor penyebab dan jumlah statistik anak terlantar,selebihnya sangat lemah analisisnya, sehingga tidak ada pemetaanaset dan kapabilitas yang utuh dari komunitas anak terlantar.Akibatnya, hasil

pembangunan yang diharapkan dari suatu program pemberdayaan belum nampak secara nyata pada anak-anak terlantar. Menurut Chambers (1987), Friedmann (1992) dan Narayan (2000), suatu program pemberdayaan akan memperlihatkan hasil pada beberapa parameter, yaitu : 1). *Improved governance and access to justice*; 2). *Functioning and more inclusive basic services*; 3). *More equitable access to markets and business service*; 4). *Strengthened civil society*; 5). *Strengthened poor people's organizations*; dan 6). *Increased assets and freedom of choice*. Semua item-item di atas sama sekali belum nampak dalam program pemberdayaan anak terlantar di NTB yang dijalankan oleh Pemda NTB. Belum terbangun *governance* dan akses keadilan kepada komunitas anak terlantar, justru anak terlantar semakin berkembang tiap tahunnya. Pelayanan-pelayanan yang diberikan selama ini masih sangat jauh untuk menyentuh secara signifikan terhadap komunitas anak terlantar di NTB. Kemudian pemberdayaan anak terlantar selama ini dalam bentuk bantuan dana dan ketrampilan kewirausahaan tidak jelas secara keberlanjutannya, sehingga belum ada akses kepada sektor pasar dan bisnis.

Program pemberdayaan menurut teori Chambers, Friedmann dan Narayan, seharusnya melibatkan berbagai *stakeholder* dan menguatkan kelembagaan aktor-aktor pelaksanaan di tingkat masyarakat. Kenyataan di lapangan memperlihatkan dua hal, yaitu lemahnya keterlibatan dan lemahnya kapasitas kelembagaan. Keterlibatan *stakeholder* selama ini sangat lemah, walaupun adalanya sebatas penerima dana bantuan untuk membantu menampung, membina dan membimbing anak terlantar di panti-panti asuhan atau rumah singgah. Hal ini menggambarkan lemahnya fungsi pembangunan kemitraan pemerintah untuk melibatkan berbagai *stakeholder* dan pada sisi lain kekuatan organisasi masyarakat juga lemah secara kelembagaan. Akibatnya, peran dan fungsi organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan program pemberdayaan anak terlantar tidak optimal, bahkan cenderung menjadi beban anggaran dan beban sosial.

SIMPULAN

Pertama, Pemerintah Provinsi NTB telah menjalankan Program Pemberdayaan Anak Terlantar melalui berbagai bentuk kegiatan seperti Pendidikan dan pelatihan bagi anak terlantar melalui BLK/KLK/LBK, bantuan usaha ekonomi produktif, bantuan bagi organisasi sosial, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat, melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi anak-anak terlantar, dan melakukan pendampingan sosial bagi anak-anak terlantar, serta melaksanakan sosialisasi dan diseminasi tentang perlindungan anak. Namun, apa yang telah dilakukan oleh Pemprov NTB masih jauh dari esensi pemberdayaan seperti menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), dan memberdayakan mengandung pula arti melindungi.

Kedua, Pelaksanaan program pemberdayaan anak terlantar di NTB dinilai memberikan hasil dan manfaat bagi komunitas anak-anak terlantar. Namun, hasil dan manfaat tersebut belum dirasakan secara merata oleh keseluruhan anak terlantar di NTB dan belum jelas sejauhmana keberlanjutan program tersebut.

Saran

Pertama, perlu dilakukan perancangan ulang terkait program pemberdayaan anak terlantar di NTB yang berbasis pada prinsip perencanaan transparan, partisipatif, dan akuntabel dengan melibatkan berbagai *stakeholder* terkait.

Kedua, untuk menjamin keberlanjutan program pemberdayaan anak terlantar di NTB, maka perlu didukung oleh perangkat hukum dalam bentuk peraturan daerah sehingga terjamin dari aspek anggaran, program, dan keberlanjutannya.

Ketiga, untuk memaksimalkan hasil dan manfaat, maka perlunya perubahan kultur birokrasi daerah agar tidak sekedar melaksanakan program sebagai bentuk seremonial semata dan penyerapan anggaran tanpa memberikan dampak signifikan bagi anak-anak terlantar di Provinsi NTB.

Keempat, kalangan organisasi masyarakat sipil, seperti LSM, ormas dan lainnya, harus pro-aktif untuk turut mengawal manajemen program pemberdayaan anak-anak terlantar di Provinsi NTB agar program tersebut efektif dan bermanfaat bagi anak-anak terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

- Clark, Barry. 1998. *Political Economy A Comparative Approach*. WestPort Connecticut London: Praeger.
- Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (2005). *Profil Anak Jalanan*, Jakarta: Balatbang Kesos.
- Ewalt, Jo Ann G. & Jennings Jr, Edward T. 2004. Administration Governance and Policy Tools in Welfare Policy Implementation. *Public Administration Review*. Vol. 4 (64).
- Friedmann, John. 1992. *Empowerment The Politics of Alternative Development*. Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publisher.
- Ikbar, Yanuar. 2006. *Ekonomi Politik Internasional Implementasi Konsep Dan Teori*. Bandung: Refika Aditama.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. "Pemberdayaan Masyarakat di Negara Berkembang". Makalah Tidak Diterbitkan, Malang.
- Kessler, Michelle L. dkk. 2005. Moving Best Practice to Evidence-Based Practice in Child Welfare. *Journal of Families in Society*. Vol. 86 (2).
- Kusumaatmadja, Sarwono. 2007. *Politik dan Kebebasan*. Depok: Koekoesan.
- Muluk, Khairul M.R. 2007. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mulyadi, dkk, 2011. *Studi Kebutuhan Anak Jalanan*. P3KS Press dan Pusdatin Kementerian Sosial RI, Jakarta.
- Narayan, Deepa, et al. 2000. *Can Anyone Hear Us?: Voices of the Poor?*. Washington, DC: Oxford University Press.
- Prasodjo, Eko. 2007. Makalah "Perkembangan Ilmu Administrasi dan Implikasinya Pada Institusi Pendidikan Tinggi Abad 21".
- Raper, Michael. 2008. *Negara Tanpa Jaminan Sosial Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia*. Jakarta: TURC.
- Rondinelli, D.A. dan Cheema G. Shabbir. 1983. *Implementing Decentralization Policies And Introduction*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Sarundajang, S.H. 2002. *Arus Balik kekuasaan Daerah*. Jakarta: CV. Muliasari.
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulastomo. 2008. *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Stewart, Ranson and John Stewart. 1994. "Management for the Public Domain : Enabling the Learning Society". ST. Martin's Press ltd. New York.
- Strauss, A Corbin, J. 2003. *Basic of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*, Sage Publication, Beverly Hills.
- Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Nusa Tenggara Barat dalam Angka Tahun 2012
- RPJMD Provinsi NTB Periode 2009-2013